

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo,  
Kabupaten Rokan Hulu)**

**SKRIPSI**

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**ABDUL WAHID**  
**11722102778**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2020M/1442H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
MENUAI PADI DI DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Wahid  
Nim : 11722102778  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. WAHIDIN, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)”** yang ditulis oleh:

Nama. : Abdul Wahid  
 NIM : 11722102778  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.,Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika, M. Si**

Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib. M. Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

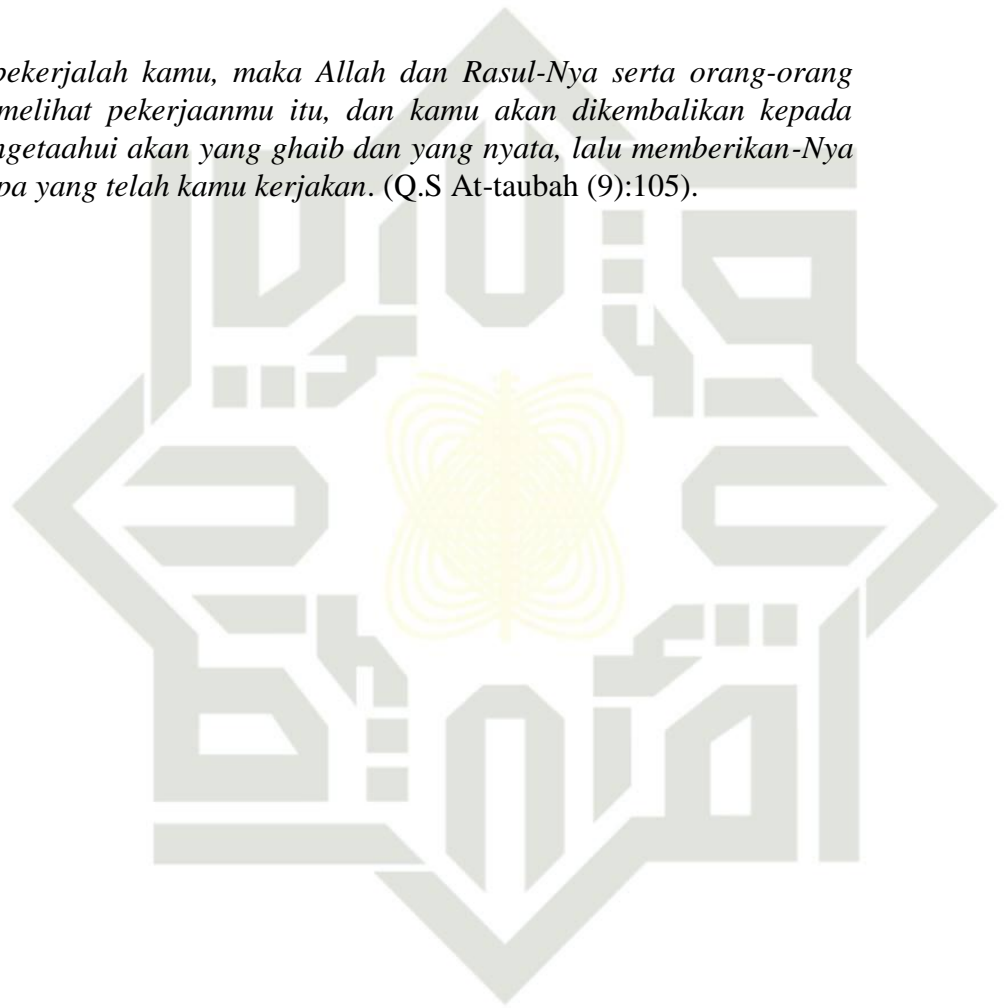
NIP. 19741006 200501 1 005



## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu memberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-taubah (9):105).



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Abdul Wahid, (2021): *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu).*

Kehidupan Masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sejatinya tidak pernah luput dari kata kerjasama atau di sebut juga dengan bermuamalah, muamalah merupakan aktivitas kerjasama maupun interaksi yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yaitu Ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya yang merupakan hubungan vertikal antara hamba dengan tuhan yaitu allah SWT. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di Desa Langkitin yaitu Akad Bawon atau lebih dikenal dengan Seperempat, yang mana sistem akad panen padi ini yaitu membayar upah dengan hasil panen bukan dalam bentuk uang. dengan perhitungan jumlah hasil panen, misalkan hasil yang didapat seorang penuai dari lahan A berhasil panen dengan 4 kaleng maka upah yang diberikan kepada penuai padi ialah seperempat yaitu 1 kaleng untuk penuai padi dan 3 kaleng untuk pemilik lahan, dengan kata lain apabila 8 kaleng maka penuai padi berhak mendapat upah 2 kaleng dan begitu seterusnya. Dan apabila mendapatkan hasil panen diluar seperempat maka penuai tetap mendapatkan 1 kaleng.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat/para penuai padi dan pemilik lahan pertanian padi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 112 orang, dimana 108 orang adalah penuai padi dan 4 orang adalah pemilik lahan pertanian padi.

Dari kepemilikan harta berupa upah yang mana berbentuk gabah dan bukan dalam bentuk uang di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dipahami melalui al-‘Urf. Al-Urf dapat dijadikan landasan hukum karena sudah berlangsung lama dan turun temurun menjadi adat istiadat sebagaimana disebutkan dalam kaidah “al-adatu muhakkamah” yang berarti adat kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang mana mereka tidak ada yang menentang sistem perpindahan kepemilikan seperti itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan hulu)*. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Paet Nasution yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya. dan ibunda tersayang Guswenti, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
  3. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
  4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
  5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  7. Terimakasih juga kepada Adik kandung ananda, Eta Sophia, Nurlis, sri Mulyana, Peni Rosadi dan adik bungsu Hadi Anwar yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang ananda mengikuti pendidikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Jondri Polta selaku Resepsionis informasi kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Kepala Desa Langkitin Bapak Refli Nasution, beserta jajarannya yang telah memberi izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di desa Langkitin.
11. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat tersayang forum FK-Massya, Muhammad Ali Mahmdin, Ahmad Khamsy, Aldi Dwi Julianto, Ahmad Fauzi, Nanda Syawal, Andri Ramadhan yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
13. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah B, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi motivasi lainnya.
14. Dan terkhusus juga untuk dari pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini, kak vini, kak tanti, bang Anto, bang apno, kak Ita dan lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah juallah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

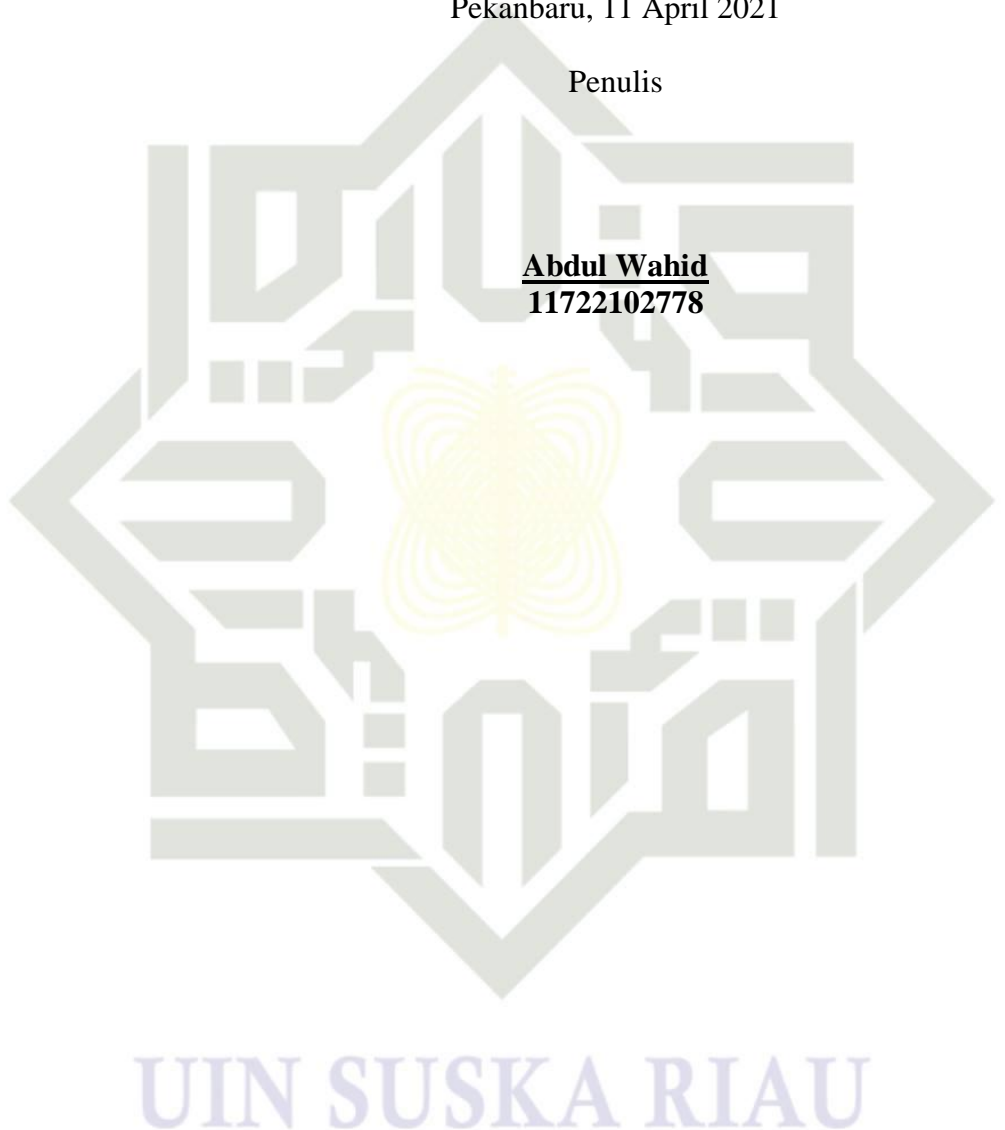
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 11 April 2021

Penulis

**Abdul Wahid**  
**11722102778**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografi dan Topografi Desa Langkitin .....	18
B. Luas dan Penggunaan Tanah .....	18
C. Kependudukan .....	20
D. Keadaan Ekonomi .....	24
E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya .....	25
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad Bawon (Seperempat) .....	28
B. Ijarah .....	28
C. Ujrah (Upah Mengupah) .....	34
D. ‘Urf .....	36
E. Hak Milik .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Status Kepemilikan Lahan Pertanian Padi Dengan Akad Bawon (seperempat) di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. ....	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Akad Panen Lahan Pertanian Padi Sistem bawon (seperempat) di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu .....	55
C. Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam Dengan Sistem Bawon (seperempat). ....	60
D. Tabel Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam Dengan Sistem Bawon (seperempat). ....	63

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Desa Langkitin Menurut Penggunaanya .....	19
Tabel 2.2	Klasifikasi Penduduk Desa Langkitin Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 2.3	Klasifikasi Penduduk Desa Langkitin Menurut Agama Dan Kepercayaannya .....	21
Tabel 2.4	Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau Birandang Tahun 2020/2021 .....	22
Tabel 2.5	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Langkitin .....	23
Tabel 2.6	Klasifikasi Penduduk Desa Langkitin Menurut Tingkat Pendidikan .....	24
Tabel 2.7	Data Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Langkitin ...	25

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sejatinya tidak pernah luput dari kata kerjasama atau di sebut juga dengan bermuamalah, muamalah merupakan aktivitas kerjasama maupun interaksi yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yaitu Ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya yang merupakan hubungan vertikal antara hamba dengan tuhan yaitu Allah SWT.<sup>1</sup>

Bermuamalah dalam artian adanya kerjasama antara satu orang dengan orang lainnya ataupun satu pihak dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad yang mana akad tersebut diatur oleh Hukum Islam atau yang lebih kita kenal dengan kata Fikih Muamalah.

Sebagian masyarakat beranggapan persoalan Muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawi yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidaklah benar, karena sebagai seorang muslim apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan.

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), Hal.6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam berbagai transaksi seperti jual beli, jasa, dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah di syariatkan Allah dan Rasulnya. Disisi lain perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern menjadi faktor adanya bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam kitab Fiqih klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang di syariatkan. Masyarakat Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu merupakan masyarakat yang kental akan ilmu agama dan masih memegang teguh rasa kekeluargaan di dalam segala aktivitas terkhusus bekerjasama atau bermuamalah.

Salah satu bentuk Muamalah yang terjadi dalam masyarakat Desa Langkitin adalah *bawon*, *bawon* merupakan upah berupa benda atau hasil panen dan bukan dalam bentuk uang yang di berikan pemilik lahan kepada peneuai padi dengan bagian tertentu dari hasil panen, *bawon* dilakukan dengan tujuan mempermudah pekerjaan dalam memanen padi dan mempersingkat waktu pengerjaannya, *bawon* mengupah peneuai padi dengan hasil panen, yang mana menurut peneliti sendiri hal ini tidak seimbang antara pekerjaan dan hasil yang di dapat oleh peneuai, mengingat pekerjaan peneuai yang sangat berat dan hasil panen tidak menentu.

Di Desa Langkitin masyarakat biasanya menanam padi dengan *salapari*, istilah *salapari* di Desa Langkitin diartikan adanya saling tolong menolong tanpa adanya upah dan harus timbal balik. Misalkan si A membantu si B menanam padi di lahan A, maka si A memiliki kewajiban untuk ikut menolong apabila si B



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ingin menanam padi di lahannya. Sedangkan perawatan seperti pemupukan, pembersihan hama dan lain-lain di lakukan sendiri oleh pemilik lahan.

Pada saat padi mulai menguning maka padi siap untuk di panen. Untuk itu pemilik lahan membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanen padi di lahannya. Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Penuai akan mendapat imbalan dari sebagian padi-padi yang dipanen tersebut dengan perbandingan hasil bagi tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan penuai padi.

Dalam pembahasan ini peneliti membahas hasil panen padi, yang mana sistem akad panen padi ini yaitu membayar upah dengan hasil panen dengan perhitungan jumlah hasil panen, misalkan hasil yang didapat seorang penuai dari lahan A berhasil panen dengan 4 kaleng maka upah yang diberikan kepada penuai padi ialah seperempat yaitu 1 kaleng untuk penuai padi dan 3 kaleng untuk pemilik lahan, dengan kata lain apabila 8 kaleng maka penuai padi berhak mendapat upah 2 kaleng dan begitu seterusnya. Dan apabila mendapatkan hasil panen diluar seperempat maka penuai tetap mendapatkan 1 kaleng.

Menurut bapak Kaharudin Sebagai pemilik lahan yang sudah bertani padi selama 50 tahun mengungkapkan bahwa dari lahan seluas kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan 70 kaleng setiap panen nya, yang mana bapak kaharudin merawat padinya sendiri tanpa di bantu orang lain, dimulai dengan penanaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara salapari<sup>2</sup>, kemudian perawatan secara sendiri dan kemudian di panen dengan cara bawon atau lebih di kenal bagi seperempat,yakni bukan dengan bentuk uang melaikan dengan hasil panen itu sendiri.

Peneliti juga berwawancara dengan ibu juliarna sebagai penuai padi yang mengatakan bahwa akad sepeti ini telah ada sejak lama di desa langkitin, dari masa tetua Desa Langkitin hingga saat ini, dalam memanen padi di butuhkanb kurang lebih dari 7 atau 8 orang dengan masa pengerjaan 1 sampai 2 minggu tergantung proses pengerjaan sulit atau banyaknya padi yang harus di panen di lahan tersebut. Terkadang semakin sulit lahan untuk di jangaku maka pembagian dapat menurun menjadi sepertiga mengingat jalan menuju lahan padi di Desa Langkitin masih memalui jalan rusak dan sulit untuk di lalui. Perjalanan penuai menuju lahan padi tidaklah mudah mengingat perjalanan menuju lahan tidak dapat di tempuh dengan menggunakan sepeda motor dan harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang terbilang jauh.

Hasil yang di dapat pennaipun tidak menentu tergantung pada kualitas dan kuantitas padi itu sendiri. kemudian di upah dengan menggunakan hasil dari panen tersebut tanpa menghitung harga perkaleng padinyanya di desa tersebut. Sehingga menurut peneliti adanya ketidak seimbangan dalam pembagian hasil panen padi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

Tradisi bawon atau saporopat sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, karena kegiatan bawon ini merupakan simbiosis mutualisme, dimana akan

---

<sup>2</sup> Salapari merupakan istilah di desa langkitin yang berarti suatu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa adanya imbalan atau upah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguntungkan dan sangat membantu sebagian kaum petani dan penguai padi itu sendiri. Uraian di atas jelaslah bahwa apabila dalam hal upah maka takaran, ukuran dan statusnya itu harus jelas dan harus diberitahu terlebih dahulu upahnya barulah mempekerjakan pekerja di sawah atau lahan kita.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Praktek seperti ini telah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, dengan jaminan upah menuai padi bersumber dari hasil panen tersebut. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama seperti ini disebut dengan ijarah amali (pekerjaan). Ijarahg terbagi kepada 2 jenis yaitu ijarah Manfaat dan Ijarah Pekerjaan.

Dilihat dari konteksnya dapat dipahami bahwa, Al-Quran dapat di perankan secara efektif termasuk dalam rangka pemeliharaan, ketertiban umum dan keamanan, kerusakan seharusnya di sebabkan oleh kekuatan ketidak percayan bisa “diperbaiki” dengan “penyembuhan” kebenaran Al-Quran.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Suhayib Suhayib, “Pemikiran Tasawuf Said Nursi Dalam Pemberdayaan Politik (Al-Tahsin Al-Siyasi) Masyarakat Muslim Turki (Studi Atas Kitab Al-Matsnawi An-nuri)”, Jurnal An-Nisab, jilid 38, (2013), h.65



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dikatakan sultan duli yang teramat mulia paduka seri pengiran muda Haji Al-Muhtadee Billah: “agama islam adalah jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua, dan tidak seorangpun yang perlu takut dan merasa ragu mengenai hal itu.”<sup>4</sup>

Tenaga kerja muncul karna adanya hubungan antara pemberi kerja dan orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 tentang ketenagakerjaan menerangkan bahwa, pekerja atau buruh adalah orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Islam upah atau imbalan dikenal dengan istilah *ijarah*. Namun istilah itu juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab Al Ijarah berasal dari kata Ajara (أَجَرَ) yang arti menurut bahasanya ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan:

---

<sup>4</sup> Syamrudin Nasution Dan Suhayib Suhayib, “Sejarah Perkembangan Islam Di brunei Darussalam”. Jurnal: Nusantara; Journal For southeast Asian Islamic Studies, Jilid 14, (2020), h. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلَا جَارَةٌ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

*Ijarah diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya “iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah /pahala).<sup>5</sup>*

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan

ijarah, antara lain adalah, Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِكُكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

*Akad untuk membolehkan pemilikan manfa'at yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.<sup>6</sup>*

Sedangkan menurut malikiyah bahwa ijarah adalah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفْعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَاتِ

*Nama bagi 'Aqad-akad untuk kemanfa'atan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan<sup>7</sup>.*

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairoh bahwa yang di

maksud dengan ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

*Akad atas manfa'at yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang di ketahui ketika itu.*

Menurut Hanabilah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الْأَجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

*Ijarah adalah suatu akad atas manfa'at yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.*

<sup>5</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.316.

<sup>7</sup> Ibid.,Hlm 316-317

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menurut Ulama syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang di tuju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>8</sup>

Di dalam Islam kegiatan ijarah ini dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagaimana telah difirmankan dalam Q.S Al-Qashas (28):

26

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ ۖ اسْتَجَرُّهُ يَأْتِي إِحْدَهُمَا قَالَتْ

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*

Dalam hal ini, Objek ijarah harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek ijarah adalah harta yang bersifat isti'maly.<sup>9</sup> Atau harta yang mungkin untuk bisa di manfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti pertanian. Ayat tersebut menjelaskan tentang terjaminnya upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka, maka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpretam Mandiri, 2010) Hal. 277

<sup>9</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 184.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik lahan maupun penuai itu sendiri. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawab.

Desa Langkitin merupakan desa yang bermata pencaharian dengan berdagang dan bertani. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan petani untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja. Pada saat tiba musim panen, para petani membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanennya. Mulai dari ngarit (memotong padi dari akarnya dengan menggunakan alat sabit) sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung.

Dari semua pekerjaan yang mereka lakukan, tentunya mereka akan mendapat upah. Dalam hal ini upah yang di peroleh bukanlah berupa uang, melainkan berupa padi yang berbeda harganya tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditakar dengan kaleng, kemudian dibagi 1/4 (seperempat) itu merupakan upah yang diberikan untuk para penuai padi. Banyaknya upah yang akan diperoleh penuai padi ialah tergantung dari seberapa banyak yang mereka kumpulkan dari hasil panen di lahan pemilik padi tersebut.

Desa Langkitin merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Jarak Desa Langkitin dengan Ibu Kota Kecamatan terdekat lebih kurang 5 km dengan lam jarak tempuh sekitar 30 menit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Langkitin merupakan dataran tinggi, yang mana mayoritas mata pencaharian nya adalah pertanian, perkebunan dan perdagangan.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Langkitin ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap KK memiliki kebun, namun banyak juga yang masih berprofesi sebagai penuai padidilahan milik orang lain. Dengan besarnya kebutuhan tenaga dalam memanen hasil pertanian maka rakyat di Desa Langkitin tak jarang menyewa penuai padi, dengan harapan dapat mempermudah dan mempercepat panen di lahannya.

Mengingat Perjalanan penuai menuju lahan padi tidaklah dan harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang terbilang jauh. Serta Hasil yang di dapat penuaipun tidak menentu tergantung pada musimnya. kemudian di upah dengan menggunakan hasil dari panen tersebut tanpa menghitung harga perkaleng padinyanya di desa tersebut.

Peneliti merasa adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan penuai padi dengan hasil yang didapatkan nya dan cenderung samar-samar dan tidak pasti. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta untuk menghindari terlalu banyaknya permasalahan yang timbul sehingga tidak fokus dan tidak terarah pada rumusan masalah maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

in. Maka Peneliti membatasi masalah yang ditulis mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek upah menuai padi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil panen atau lebih dikenal dengan kata bawon atau seperempat di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

**C. Rumusan Masalah**

Beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek upah menuai padi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek upah menuai padi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek upah menuai padi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek upah penuai padi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan Manfaat penelitian ini adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah hukum praktek upah penuai padi di Desa Langkitin.

## E. Metode Penelitian.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, baik, dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dalam penelitian ini, unit sosial yang dimaksud ialah masyarakat bertempat tinggal di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupatebn Rokan Hulu.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda yang bisa di jadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan.<sup>10</sup> Dan untuk penelitian ini penulis memilih subjek untuk diteliti yaitunya masyarakat/para penuai padi

<sup>10</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan para pemilik lahan pertanian padi, di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu..

- b. Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang di bahas, di kaji, atau di teliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu praktek Akad Bawon ditinjau dari hukum Islam.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat/para penuai padi dan pemilik lahan pertanian padi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 112 orang, dimana 108 orang adalah penuai padi dan 4 orang adalah pemilik lahan pertanian padi.

##### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.<sup>12</sup> Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.115.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.15, 2014), h.174.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.<sup>13</sup> Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana responden yang dijadikan sampel adalah orang-orang yang menurut pertimbangan peneliti dianggap lebih mengetahui dan cakap untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Maka sampel dari penelitian ini ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah populasi atau sebanyak 21 orang petani, selanjutnya karena sampel dari pemilik lahan pertanian padi hanya 4(empat) orang, maka dipakai seluruhnya dengan teknik total sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 25 orang.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan. dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara), dan observasi mengenai praktek akad bawon di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti

---

<sup>13</sup> Donald R.Cooper dan C.William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga), h.214.

<sup>14</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 63.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik upah menuai padi di Desa Langkitin. dari masing-masing pihak dimana praktik itu berlangsung yaitu di rumah-rumah para petani yang melaksanakan akad bawon tersebut. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti yaitu, di jDesa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>15</sup> Narasumber disini adalah masyarakat atau para penguai padi sebanyak 6(enam)orang dan para pemilik lahan pertanian padi sebanyak 4(empat)orang.
- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, Cet.1, 2011), h.138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian praktek akad bawon atau lebih dikenal akad seperempat pada masyarakat/para petani di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan proposal ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penyusun menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuandan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LOKASI PENELITIAN**

Desa Langkitin,Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.  
Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan upah menuai padi di Desa Langkitin. Pada bab ini juga penyusun memaparkan tentang orang yang melakukan praktek upah menuai padi.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang upah menuai padi dan ijarah dalam islam yaitu berupa pengertian pengupahan atau sewa menyewa (ijarah), landasan hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, hal yang membatalkan ijarah, pengambilan manfaat dalam ijarah, teori ini bertujuan untuk memberi penerangan terhadap praktek upah menuai padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menggambarkan analisis bagaimana praktik upahan atau bawon yang dilakukan masyarakat Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ini berdasarkan hukum Islam dengan kerangka teori yang digunakan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dengan lampiran-lampiran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Geografi dan Topografi Desa Langkitin

Desa Langkitin merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, jarak Desa Langkitin dengan ibu Kota Kecamatan terdekat lebih kurang 5 km dengan lama jarak tempuh sekitar 15 menit, dengan ibu Kota Kabupaten lebih kurang 20 km dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Desa Langkitin merupakan dataran tinggi. Berdasarkan letak Geografi, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Mulya, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marga Mulya dan Desa Sungai Salak, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Samo Barah, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Samo. Curah hujan berkisar antara 2.500 -2.650 mm/tahun, Suhu udara tahunan berkisar 32°C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan bulan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan bulan Juli.

#### B. Luas dan Penggunaan Tanah

Luas Wilayah Desa Langkitin adalah 916.3 Ha yang terdiri dari area permukiman, pertanian/perkebunan, kebun kas desa, perkantoran, sekolah, jalan, dan lain-lainnya yang dapat dilihat pada tabel I. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Langkitin adalah untuk lahan pertanian/perkebunan yaitu dengan luas kurang lebih 500 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencarian utama penduduk Desa Langkitin adalah sektor perkebunan yaitu karet, kelapa sawit dan padi. Penggunaan halan yang paling kecil untuk perkantoran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu 0.25 Ha. Perkebunan karet 100% merupakan perkebunan masyarakat swadaya dimana para tetua desa dulunya menebang hutan dan menanam karet lokal sehingga perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

Selain tanaman karet dan kebun sawit, terdapat juga berbagai jenis pertanian seperti padi, jagung, pepaya, tebu, dan lain-lain. Desa ini terkenal dengan dengan tanahnya yang subur sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam dengan lahan yang cukup luas, dan juga desa ini memiliki petani yang sangat memperhatikan kualitas hasil panen dari pertanian maupun perkebunannya baik itu kelapa sawit, karet maupun pertanian padinya, Selain itu Desa Langkitin memiliki banyak aliran sungai yang sangat mudah di temukan, sehingga jarang sekali petani kekurangan air dalam memelihara tanaman nya<sup>16</sup>.

**TABEL 2.1**  
**LUAS DESA LANGKITIN**  
**MENURUT PENGGUNAANYA**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	200 ha
2.	Pertanian/Perkebunan	500 ha
3.	Kebun Kas Desa	2,25 ha
4.	Perkantoran	0,25 ha
5.	Sekolah	1,5 ha
6.	Jalan	12 ha
7.	Dan lain-lainnya	200,3 ha
<b>Jumlah</b>		<b>916.3 ha</b>

*Sumber: Monografi Desa Langkitin, 2019*

#### C. Kependudukan

<sup>16</sup> Refli Nasution, Kepala Desa Langkitin, Wawancara pada tanggal 19 April 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut Monografi Desa Langkitin tahun 2019 penduduknya berjumlah 2.045 jiwa, yang terdiri dari 1.046 Jiwa laki-laki dan 999 Jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga 551 KK.

**TABEL 2.2**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA LANGKITIN**  
**MENURUT JENIS KELAMIN**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	1.046
2.	Perempuan	999
3.	Kepala Keluarga	551
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.045</b>

*Sumber: Monografi Desa Langkitin, 2019*

## 2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan didalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Langkitin, seluruh komponen masyarakat nya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Langkitin mencerminkan budaya Islam<sup>17</sup>.

**TABEL 2.3**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA LANGKITIN**  
**MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA**

No	Nama Agama	Jumlah Penganutnya
1	Islam	2.045
2	Budha	-
3	Hindu	-
4	Kristen	-
5	Konghucu	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.045</b>

*Sumber: Monografi Desa Langkitin, 2019*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Langkitin yaitu 2.045 orang (100%) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidaya dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Langkitin seluruhnya beragama Islam.

Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan di berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 2 buah masjid, 1 mushallah dan 2 surau. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain seperti tabel dibawah ini.

**TABEL 2.4**

<sup>17</sup> Refli Nasution, Kepala Desa Langkitin, Wawancara pada tanggal 20 April 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUMLAH LEMBAGA KEAGAMAAN DESA PULAU BIRANDANG  
TAHUN 2020/2021**

No	Tempat Beribadah	Jumlah
1	Mesjid	8 unit
2	Mushollah	4 unit
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

*Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Langkitin adalah sebanyak 2 unit mesjid 1 unit mushollah dan 2 unit surau.

**3. Pendidikan**

Pendidikan di Desa Langkitin secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah di tinggalkan oleh penduduk Desa Langkitin dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan menanamkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah<sup>18</sup>.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintahan telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini perguruan tinggi sudah ada di Desa Langkitin sehingga akan lebih memudahkan

<sup>18</sup>Ibuk Masdian S.Pd.i, Guru SD, Wawancara di Desa Langkitin tanggal 21 April 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk masyarakat melanjutkan sekolah mereka sampai kejenjang yang lebih tinggi dan dekat dengan cita-cita mereka.

**TABEL 2.5**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN**  
**DI DESA LANGKITIN**

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	PAUD	-	1	1
2	TK	-	1	1
3	SD	1	-	1
4	MDA	-	1	1
5	MI	-	-	-
6	KAMPUS	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

*Sumber: Monografi Desa Langkitin, 2019*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Langkitin terdapat 1 Pendidikan Usia Dini, 1 Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Dasar Negeri, 1 MDA, 1 Perguruan Tinggi.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus Sekolah Menengah Atas melanjutkan ketempat lain.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Langkitin ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Langkitin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL 2.6**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA LANGKITIN**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	SD/MI	480
2	SLTP/MTS	250
3	SLTA/MA	555
4	S1/Diploma	15
5	Putus Sekolah	29
6	Buta Huruf	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.329</b>

*Sumber: Monografi Desa Langkitin, 2019*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Langkitin hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 480 jiwa dan tamat SLTA/MA yaitu 555 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Desa Langkitin berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit ialah masyarakat yang Diploma/S1 yaitu 15 jiwa dan masyarakat yang putus sekolah 29 jiwa.

Hal ini telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, jadi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Langkitin tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk merantaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan<sup>19</sup>.

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi Desa Langkitin, hampir sebagian besar mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani baik petani padi, petani karet, maupun petani kelapa sawit. Di samping itu juga ada wiraswasta, pedangang dan

<sup>19</sup> Refli Nasution, kepala Desa Langkitin, Wawancara dengan tanggal 22 April 2021

beberapa yang bermata pencarian lainnya, sebagian dijelaskan pada table di bawah ini:

**TABEL 2.7**  
**DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DESA LANGKITIN**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2234 Orang
2.	Pedagang	124 Orang
3.	PNS	120 Orang
4.	Tukang	70 Orang
5.	Guru	55 Orang
6.	Pensiunan	83 Orang
7.	Swasta	80 Orang
8.	Lainnya	126 Orang

*Sumber: Monografi Desa Langkitin 2019*

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penduduk Desa Langkitin hampir sebagian besar bermata pencarian petani yaitu berjumlah 2234 orang/jiwa, yang artinya setiap penduduk memilikilah pertanian dan perkebunan untuk mereka tanami. Akan tetapi jenis pekerjaan yang paling sedikit di Desa Langkitin adalah mata pencarian guru yaitu hanya berjumlah 55 orang/jiwa.

#### **E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya**

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke.

Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Langkitin yang terdiri dari Marga Mandailing, seperti: Marga Nasution, Marga Hasibuan, Marga Lubis, Marga Harahap dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam Marga namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Langkitin adalah berdasarkan garis keturunan ayah (Patrilineal), sehingga setiap anak dan kemenakan<sup>20</sup>, lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibunya.

Selanjutnya menurut adat di Desa Langkitin anak Laki-laki mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak Laki-laki dianggap penerus garis keturunan yang berpola patrilinear.

---

<sup>20</sup> Kemenakan dalam Bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat Desa Pulau Birandang dikenal dengan istilah Kemenakan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Bawon (Seperempat)

##### 1. Pengertian Akad Bawon (seperempat)

Sistem pengupahan bawon atau lazim di Desa Langkitin disebut dengan seperempat adalah sebuah sistem pengupahan kerja pada pertanian tanaman padi yang diawali dengan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik lahan dengan para penuai padi. Dalam sistem upah bawon ini pemilik lahan memberikan hasil panen dengan bagian tertentu kepada para penuai padi, yang memang merupakan hak penuh mereka dari hasil panen padi.

Bagian tertentu tersebut adalah persentase hasil panen yang telah berbentuk gabah yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan penuai padi sejak lama di desa Langkitin, Kecamatan Ramabab Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun besar pembagiannya yaitu 80% dari hasil panen adalah milik pemilik lahan dan 20% dari hasil panen adalah milik penuai.

##### 2. Kelebihan dan Kelemahan dari Sistem Upah Bawon

Kelebihan bagi pemilik lahan yaitu:

- a. Tingkat risiko yang rendah
- b. Biaya pekerja yang lebih ringan
- c. Kualitas kerja para penuai yang lebih baik
- d. Ikatan sosial antara pemilik lahan penuai padi semakin erat terjalin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan bagi penuai padi

- a. Keuntungan hasil panen yang lebih besar berupa gabah
- b. Menambah persediaan stok pangan dalam jangka waktu yang lama
- c. Terjaminnya masa kerja dan adanya lowongan kerja yang sulit didapat
- d. Ikatan sosial antara buruh penggarap dengan pemilik lahan semakin erat terjalin.

Kelemahan bagi pemilik lahan adalah keuntungan hasil panen akan berkurang Kelemahan bagi para penuai adalah risiko yang dihadapi akan tinggi ketika terjadi gagal panen.

### B. Ijarah

#### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki sesuatu manfaat(jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan. Sedangkan secara istilah, para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Menurut Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

- b. Menurut Ulama Asy – Syafi’iyah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدال والاعباحة معلوم بعوض

<sup>21</sup> Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

“Pemilikan manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh.<sup>22</sup> Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits Nabi dan ketetapan Ijma Ulama. Adapaun dasar hukum tentang kebolehan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Q.S Az-Zukhruf(43):32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

<sup>22</sup> Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Firman Allah dalam QS. At-Thalaq(65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِغْ لَهُ ذَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati) mereka. dan jika mereka(isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan(anak itu) untuknya.”*

- c. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”(HR. Ibnu Majah).<sup>23</sup>*

Perlu diketahui bahwa tujuan diisyaratkannya ijarah adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Cet. Ke-2, ( Amman, Yordania : Al-Ma’arif, 1417 H), h.420.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-Ijarah, al- Isti'jar, al-iktira', dan al-ikra.<sup>24</sup> Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada empat(4), yaitu:

- a. Aqid (orang yang berakad yaitu mu'jir dan musta'jir)
- b. Shigat akad
- c. Ujrah(upah)
- d. Manfaat

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka(sebagai buruh), menurut mereka, ijarah- nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Serang: Amzah, 2010), h. 71.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perelisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek ijarah harus dapat memenuhi secara syara'. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan: *Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.*
- f. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Misalnya menyewa orang untuk shalat fardu, puasa. Juga dilarang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

- g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- h. Upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- i. Ulama Hanafiyah mengatakan upah ijarah itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.<sup>25</sup>

#### 4. Macam-macam Akad Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit dan buruh pabrik. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi (Ijarah Khusus), seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan ada yang bersifat serikat (Ijarah Mustarik), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, Op.Cit, 232-235.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>26</sup>

### C. Ujrah (Upah Mengupah)

#### 1. Pengertian Ujrah

Kata ujrah secara bahasa berarti mengupah. Secara syara' adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah ujrah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh Fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampaimemancarkan air atau seorang menang dalam suatu kompetisi. Jadi ujrah tidak terbatas pada barang yang hilang akan tetapi dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>27</sup>

#### 2. Rukun dan Syarat Ujrah

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ujrah. Adapun rukun ujrah yaitu:

- a. Lafal. Lafal mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah.
- c. Pekerjaan.

<sup>26</sup> Ibid, h. 236.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Loc.it, h. 141.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan.<sup>28</sup>

Sedangkan syarat-syarat ujah yang telah ditetapkan oleh para ulama yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Dasar Hukum Ujah

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa ujah boleh dilakukan dengan alasan berdasarkan firman Allah dalam Q.S Yusuf(12):

72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".*

Dalam hadist diriwayatkan para sahabat pernah menerima hadiah ataupun upah dengan cara ji'alah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang di patok kalajengking dengan cara membaca surat al-fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada rasulullah, karena takut hadiah itu tidak halal. Rasulullah pun ketawa seraya bersabda “ tahukah anda sekalian, bahwa itu

<sup>28</sup> Ibid, h.143.

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, Loc.it, h. 129.



adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”<sup>30</sup>.

## D. 'Urf

### 1. Pengertian dan Definisi 'Urf

Secara bahasa 'urf merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan, yang berarti mengetahui.<sup>31</sup> Adapun dalam artian lain 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah 'urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa 'urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan. Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dapat ketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia

<sup>30</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2005), h. 107.

<sup>31</sup> Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Vol 20 no 1 Tahun 2016, H. 67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

- b. Adat berbeda dengan ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
- c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'athah (*Take and Give*) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kehujjahan 'urf

Jumhur fuqaha mengatakan bahwa 'urf merupakan hujah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf(7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”*

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pastilah Allah tidak menyuruh Rasulullah saw.

- b. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.
- c. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Agar mereka tidak jatuh dalam jurang ini, kita harus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui adat kebiasaan mereka sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hajj(22): 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

*“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”<sup>32</sup>*

### 3. Macam-Macam ‘Urf

‘Urf (adat) itu ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak meghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan di akhirkkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dengan syara’, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba’ dan akad perjudian.

Menurut Abdul-karim zaidan membedakan Al-Urf menjadi dua macam<sup>33</sup>

- a. Al-Urf al-‘Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di

<sup>32</sup> Ibid, h.341.

<sup>33</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 140.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

- b. Al-Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.<sup>34</sup>

Sedangkan ‘urf ditinjau dari segi obyeknya. ‘Urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:

- a. ‘Urf bil lafdzi, yaitunya kebiasaan yang terjadi di masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam menyampaikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan daging yang berarti sapi, padahal kata daging itu adalah seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “aku beli daging satu(1) kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi disebabkan kebiasaan

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- b. 'Urf bil amali yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighat jual beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

#### 4. Syarat-Syarat 'Urf

Abdul karim zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu ;<sup>35</sup>

- a. 'Urf itu haruslah 'urf yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan al-Quran atau As-Sunnah. jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamar, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam artian Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.

<sup>35</sup> Satria Effendi, Op.Cit, h. 143.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. jika adat suatu negeri mendahulukan sebagai mahar dan menunda sebagainya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- d. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti ada yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

#### 5. Kaidah-Kaidah ‘Urf

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Keadaan urf pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Qoyyim Al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum Fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah Fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya:

*“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.*

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

## E. Hak Milik

### 1. Pengertian Hak Milik

Secara etimologi, kepemilikan (*Al-Milk*) berasal dari bahasa arab dari akar kata '*Malaka*' yang artinya penguasaan terhadap sesuatu atau pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Secara terminologi menurut istilah ulama fiqh adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada penghalang syara'.<sup>36</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hak milik adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya, dia boleh memiliki, mengambil manfaat, menghabiskan, membinasakan asal tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain serta tidak bertentangan atau berlawanan dengan syara'.

### 2. Jenis-jenis Kepemilikan

Para fukoha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua macam yang dilihat dari unsur harta (benda dan manfaaat) yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan kurang/tidak sempurna (*naqis*). Dua

<sup>36</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau keduanya.

a. Al-Milk At-Tamm (kepemilikan sempurna)

Al-Milk At-Tamm yaitu kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki tanpa dibatasi waktu. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya. Kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris ataupun wasiat.<sup>37</sup>

b. Al-Milk An-Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Al-Milk An-Naqish yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya. Milk naqish yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik naqish yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara i'arah, wakaf dan washiyah. Karakteristik Milk An-Naqish yaitu bisa dibatasi dengan waktu, tempat atau persyaratan lainnya berbeda dengan milk at-tam. Milk An-Naqish dapat dikategorikan sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Ibid. h.36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepemilikan Benda : Dalam kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.
- 2) Kepemilikan Manfaat : Hak-hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Dilihat dari segi shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) *Milk mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau. Sudah jelas batas batasnya.
- 2) *Milk al-syai" atau milk musya"*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan di hak milikkan atau tidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikkan kepada orang lain, misalnya harta milik umum seperti jalanan, jembatan,

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, Loc.it, h.41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai, dll. di mana harta atau barang/benda tersebut untuk keperluan umum.

- 2) Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah, seperti harta wakaf, harta baitul maal, dll. (harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya.

## 2. Sebab-sebab Kepemilikan

### a. *Istila' mubahat*

Istila' mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. "Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tak ada penghalang syara' untuk dimiliki." Misalnya, air yang masih ada dalam sumbernya, rumput di tanah lapang, kayu dan pohon-pohon di belantara atau ikan di sungai dan di laut. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.<sup>39</sup>

### b. *Akad*

Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan.

---

<sup>39</sup> Ibid. h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan sebab-sebab pemilikan di atas. Dari segi sebab pemilikannya dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Uqud jabbariyah (akad secara paksa) akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim. Dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain. Ini dikatakan tamalluk bil jabri (seperti syuf'ah).<sup>40</sup>
- b) Istimlak untuk maslahat umum. Umpamanya tanah – tanah yang di samping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, maka harus dapat dimiliki oleh masjid dan pemilik harus menjualnya. Ini dikatakan tamalluk bil jabri ( pemilikan dengan paksa ).

#### c. Al-Khalafiyyah

Al khalafiyyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a) Khlafiyah syakhsi 'an syakhsy (seseorang terhadap seseorang) penggantian atas seseorang oleh orang lain seperti pewarisan.
- b) Khalafiyah syai'in an syai'in (sesuatu terhadap sesuatu) Apabila seseorang merugikan milik orang lain, atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblih dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik harta.

<sup>40</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 13.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka Khalafiyah syai'in an syai'in ini disebut *tadlmin* atau *ta'wid* (menjamin kerugian).

**d. Al-Tawallud minal Mamluk(turunan dari sesuatu yang dimiliki)**

Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya atau dalam kaidah dikatakan: “ Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya”. Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif. Harta benda yang bersifat produktif di sini berarti benda hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru seperti binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan susu dan kebun yang dapat menghasilkan buah dan bunga.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut pasal 18 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara :<sup>42</sup>

- a) Pertukaran
- b) Pewarisan
- c) Hibah
- d) Pertambahan alamiah
- e) Jual – beli
- f) Luqathah
- g) Wakaf

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, Loc.it, h. 46.

<sup>42</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Tahun 2010,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h) Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

**3. Pemberian Sukarela**

Merupakan salah satu sebab kepemilikan yang merupakan pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau pemberian sukarela lainnya sesuai yang ditentukan syariah<sup>43</sup>.

**4. Pengelolaan Kepemilikan (At-Tasharruf Fi Al-Milkiyah)**

Harta dalam pandangan islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya. Sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

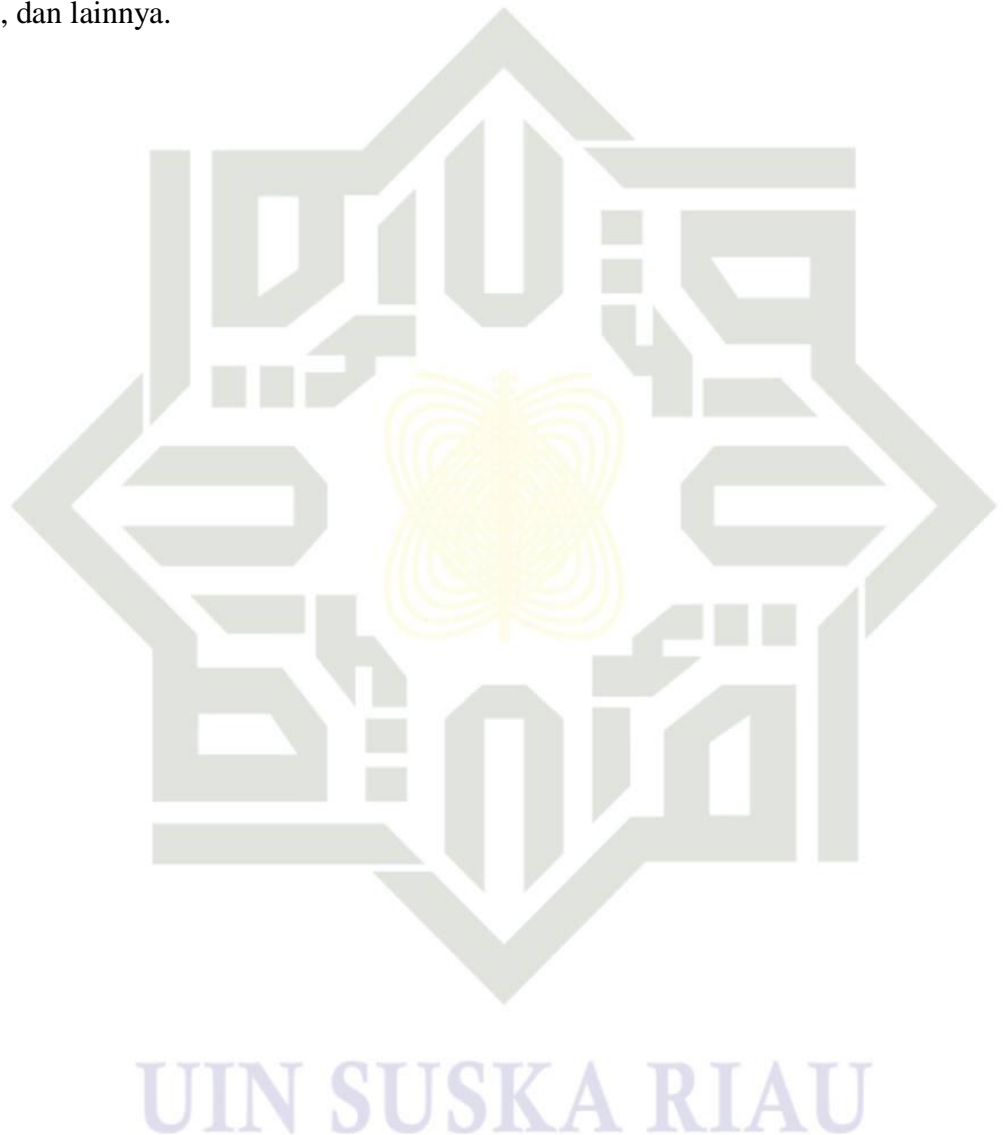
Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.<sup>44</sup>

Demikian pula saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta, yang telah dimiliki. Secara umum islam telah

<sup>43</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 140.

<sup>44</sup> Ibid, h, 220.

memberikan tuntunan pengembangan harta dengan cara – cara yang sah seperti jual beli, bekerja sama syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain itu, islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan riba, judi, mencuri, dan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “**Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan hulu).**” penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan penuai padi dengan sistem *bawon* di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah upah yang diberikan kepada penuai padi dalam bentuk *gabah* setelah panen selesai dilakukan. Pada saat panen padi menggunakan akad secara lisan, yaitu pemilik lahan meminta para penuai padi untuk memanen padi yang siap panen.
2. Ditinjau dari Hukum Islam upah buruh tani dengan sistem *bawon* di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu boleh dilakukan, karena kebiasaan tersebut termasuk dalam *urf* shahih yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran diantaranya:

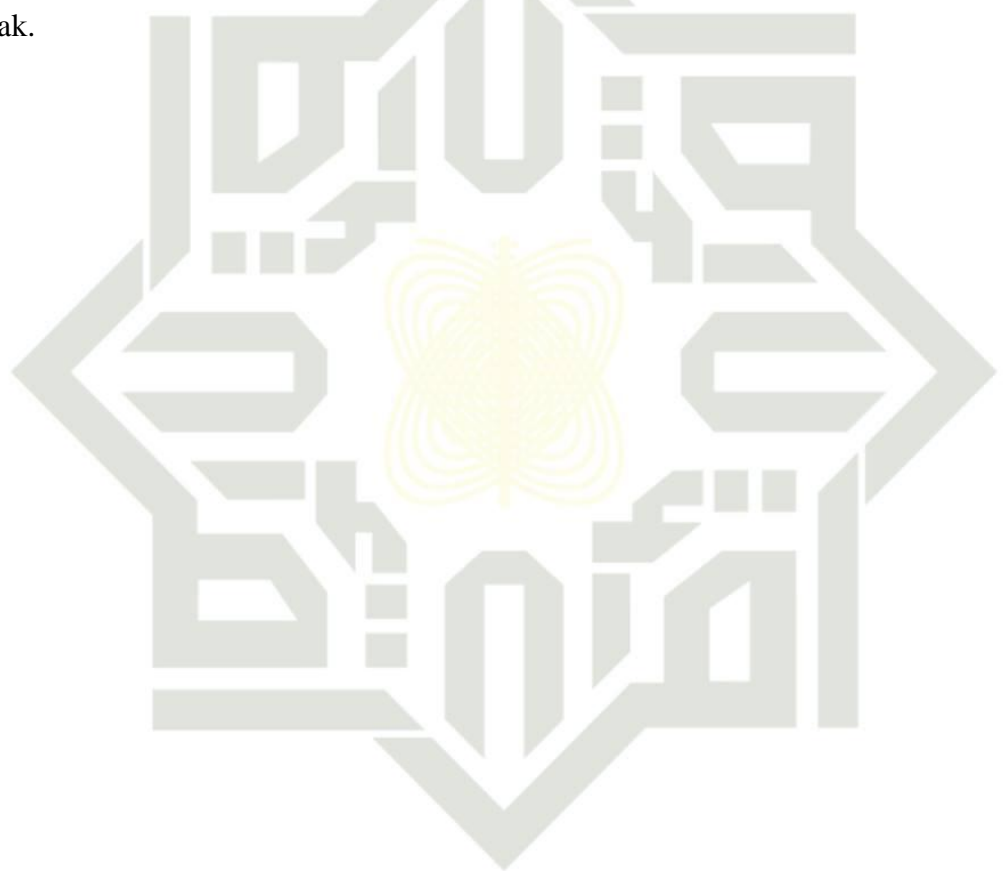
1. Pada saat awal akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan penuai padi diberikan kejelasan terhadap besarnya upah yang akan diberikan, jika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum bisa dipastikan besarnya bisa diperkirakan berdasarkan hasil panen sebelumnya. Serta tidak ada perbedaan dalam pemberian upah antar buruh supaya silaturahmi tetap terjaga.

2. Hendaknya dalam pemberian upah terhadap penguai padi menggunakan uang, walaupun pengupahan dengan sistem *bawon* termasuk dalam *urf* shahih. Karena untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Fajar Interpretam Mandiri.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010., *Fiqh Muamalat*. Serang: Amzah.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Ushu Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Dimyauddin Djuwaini. 2007. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donald R. Cooper dkk. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Fithriana Syarqawie. 2015. *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS.
- Ghufron A. Mas'adi. 2000. *Fiqh Mu'amalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi Karina. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hukum Online.com diakses pada 17 mei 2021 pukul 21.57
- Imam Mustofa. 2016. *fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Juhansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakart: Prenada Media.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rafli Nasution, Kepala Desa Langkitin, Melakukan wawancara pada tanggal 20 April 2021
- Rafli Nasution, Kepala Desa Langkitin, Melakukan wawancara pada tanggal 19 April 2021
- Rafli Nasution, Kepala Desa Langkitin Melakukan wawancara pada tanggal 22 April 2021
- Mhammad Baqir Ash Shadr. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna Terj. Yudi*,. Jakarta: Zahra.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 1417. *Shahih Sunan Ibnu Majah, Cet. Ke-2*. Amman, Yordania : Al-Ma'arif.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noor Harisudin. 2016. *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsimi Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bapak kaharuddin, pemilik lahan, Wawancara di Desa Langkitin Tanggal 16 April 2021.
- Bapak Mantak Nasution, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Langkitn tanggal 16 april 2021.
- Bapak Paet Nasution, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Langkitin tanggal 17 April 2021.
- Bapak Rajai, Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Langkitin tanggal 17 April 2021.
- Ibuk Masdiam S.Pd.i, Guru SD , Wawancara di Desa Langkitin tanggal 21 April 2021



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web: www.faih.uin-suska.ac.id Email: faih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2863/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Kepada  
Yth. Dr. Wahidin, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ABDUL WAHID  
NIM : 11722102778  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Menuai Padi Didesa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

a.n. Dekan I  
  
Dekan I  
Heri Sunandar, Mcl  
19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENUAI PADI DI DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Wahid  
 Nim : 11722102778  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. WAHIDIN, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 197101081997031003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755  
Email : [dpmptsp.rockanhulu@gmail.com](mailto:dpmptsp.rockanhulu@gmail.com) website : <http://dpmptsp.rockanhulukab.go.id>

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/084

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39760 tanggal 18 Maret 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: ABDUL WAHID
Nomor Induk Mahasiswa	: 11722102778
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: Sarjana S1
Judul Penelitian	: <b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Menuai Padi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu</b>
Lokasi Penelitian	: Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 24 Maret 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU

GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP : 19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Camat Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39760  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2964/2021 Tanggal 17 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

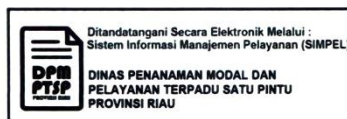
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ABDUL WAHID   |
| 2. NIM / KTP         | : 11722102778   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENUAI PADI DI DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Maret 2021



#### Tembusan :

##### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu  
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Instrumen Wawancara**

**Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu)**

**A. Pihak Penggiling**

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama akad Bawon Ini dilaksanakan Di Desa Langkitin?
2. Bagaimana proses pembagian upah dengan akad bawon ini ?
3. Berapa upah untuk para penuai padi ?
4. Apakah Hasil panen padi selalu banyak dan menguntungkan bagi penuai dan pemilik lahan?
5. Berapa orang yang di butuhkan untuk menuai padi di lahan bapak ?
6. Berapa harga padi didesa langkitin ?
7. Apakah akad Bawon sudah berlangsung sejak lama ?

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Pihak Petani

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan :

1. Apakah sudah lama menjadi penuai padi?
2. Bagaimanakah pendapat bapak/ibuk tentang Akad Bawon ini?
3. Bagaimanakah menurut bapak/ibuk Ibih baok Upah Uang atau upah gabah?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Foto Wadah Panen Padi Sekaligus Sebagai alat Takar**



**Foto Para Penuai Padi Bersama Penulis**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Foto Padi yang Telah Siap Di Panen**



**Foto Wawancara Dengan Ibuk Juliarna**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Foto Wawancara Dengan Bapak Kaharuddin**



**Foto Wawancara Dengan Bapak Kaharuddin**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN PANEN PADI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi di Desa Langkitin, Kecamatan  
Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu )”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ABDUL WAHID**  
NIM : **11722102778**  
Program Studi : **S1 Hukum Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.,Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika, M. Si**

Penguji I  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Suhayib. M. A**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Abdul Wahid  
**NPM** : 11722102778  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
**Judul** : Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam  
 (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu)

**Pembimbing** : Dr. Wahidin, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39760  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39760/PP.009/2964/2021 Tanggal 17 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>ABDUL WAHID</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : 11722102778  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jurusan           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENUAI PADI DI DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LANGKITIN KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU  |

dengan ketentuan sebagai berikut:

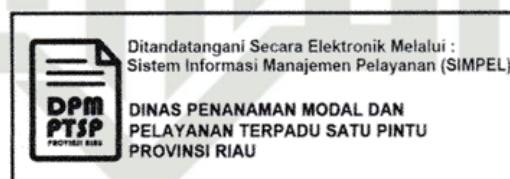
tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Maret 2021



**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
- Up. Kabag Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

**UIN SUSKA RIAU**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ABDUL WAHID** dilahirkan di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, pada 03 Juli 1998, yang merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan bapak Paet Nasution dan ibu Guswenti. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 004 Rambah Samo tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu dari tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Rokan Hulu dan menamatkan studi tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui jalur Undangan UM-PTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus 2019 penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A, serta melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Desa Suka Jadi Rokan Hulu.

Setelah melakukan KKN-DR dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu).”** dibawah bimbingan Dr Wahidin, M. Ag.